
Gelora Reformasi dari Masjid Gedhe Kauman: Aksi Pertama Luar Kampus di Yogyakarta Jelang Lengsernya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998

Ghifari Yuristiadhi¹

Mahasiswa S2 Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada

Abstract

This paper attempts to present an event prior to the fall of President Suharto in May 21 1998 in Yogyakarta. Studies that preceded this paper highlighted the dynamics in Jakarta, as the capital of the country. Even then, most of the studies highlighted Semanggi tragedy or some previous events that occurred approximately 1-2 weeks prior to his resignation, especially on campus. This paper presents community of Yogyakarta demonstration at the Great Mosque of Kauman Yogyakarta which is the first 'off-campus action' in Yogyakarta before fall of Suharto. This paper presented by historical method utilizing secondary sources such as newspapers and books, and interviews.

Keywords: Indonesian 'reformasi', 1998, local politics, Muhammadiyah, Yogyakarta

Abstrak

Tulisan ini mencoba menyajikan sebuah peristiwa jelang lengsernya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, di Yogyakarta. Kajian-kajian yang mendahului tulisan ini lebih banyak menyoroti dinamika di Jakarta, sebagai ibukota negara, menjelang reformasi. Itupun kebanyakan menyorot Tragedi Semanggi ataupun beberapa peristiwa sebelumnya yang terjadi sekitar 1-2 pekan sebelum pengunduran diri Soeharto khususnya di dalam kampus. Tulisan ini menyajikan peristiwa demonstrasi masyarakat di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta yang menjadi 'aksi luar kampus' pertama di Yogyakarta jelang turunya Soeharto. Tulisan ini disajikan dengan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti koran dan buku serta wawancara.

Kata Kunci: Reformasi Indonesia, 1998, politik lokal, Muhammadiyah, Yogyakarta

Pengantar

21 Mei 1998 menjadi salah satu tanggal yang paling monumental dalam sejarah Indonesia. Pada hari Kamis itu, Jenderal Soeharto, yang telah menjadi presiden selama 32 tahun,

menyatakan mundur dari jabatan presiden Republik Indonesia. Ini adalah klimaks dari tuntutan reformasi yang didengungkan berbagai elemen masyarakat sejak awal 1998. Reformasi yang dimaksudkan di sini tentulah lebih luas dari sekedar makna bahasanya yakni mengubah kembali susunan pemerintahan. Reformasi jika dilihat dari aspek

¹ Mahasiswa S2 Ilmu Sejarah UGM. Kritik dan saran bisa dikirim via email: ghifariyuristiadhi@gmail.com.

historis tentu tidak bisa dijelaskan sesingkat itu. Krisis ekonomi Asia, korupsi rezim, nepotisme dengan memprioritaskan keluarga dalam pemerintahan dan kongkalikong bisnis yang menguntungkan keluarga dan kroni terdekat serta pecahnya internal militer, bisa menjelaskan latar belakang berkobarnya keberanian masyarakat untuk menuntut penggulingan presiden Soeharto ini (Ricklefs, 2005: 640-650).

“Reformasi” menjadi kata yang paling sering didengungkan banyak elemen masyarakat baru beberapa bulan menjelang Mei 1998. Sebelumnya, kata itu belum lazim menjadi kosa kata masyarakat, kecuali para mahasiswa. Di Yogyakarta sendiri, tulisan reformasi di luar kampus bisa ditemui di berbagai tempat dan jumlahnya semakin banyak pada pertengahan pekan kedua Mei (Bernas, 15 Mei 1998). Pada mulanya, tidak semua unsur masyarakat paham arti kata reformasi itu, tetapi ekspos dari media, cetak maupun elektronik membuat masyarakat familiar dengan kata itu. Kosakata yang awalnya hanya digunakan akademisi kemudian menjadi milik publik. Masyarakatpun tersatukan dengan satu kata reformasi, yang menuntut perubahan rezim, nasib dan kehidupan yang lebih baik.

Satunya masyarakat dalam isu reformasi inilah yang membangkitkan masyarakat untuk mengungkapkan keinginan, aspirasi dan tuntutan dalam wujud protes, demonstrasi, ataupun unjuk rasa. Tuntutan masyarakat untuk menurunkan penguasa rezim ini dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial. Unjuk rasa inilah yang mewarnai hari-hari jelang turunnya presiden Soeharto. Yogyakarta juga merekam cerita tentang unjuk rasa menuntut bergantinya rezim. Bermula dari dalam kampus, unjuk rasa tersebut meluas ke luar kampus. Keberanian meneriakkan aspirasi melebar ke luar pagar-pagar kampus dan masuk relung hati masyarakat. Respon dari luar kampus yang dihembuskan oleh masyarakat semakin mengobarkan kepercayaan diri kaum akademisi

di kampus. Kepercayaan diri itu menyatu dan bersinergi untuk menghantam tirani. Menarik untuk disimak bagaimana proses meletusnya unjuk rasa di luar kampus pertama dalam perjalanan reformasi di Indonesia. Yogyakarta menyimpan cerita tentang hal ini. Paper ini akan mengulas secara diskriptif peristiwa protes 1 Mei 1998 yang merupakan protes pertama yang dilakukan di luar kampus oleh masyarakat non-mahasiswa jelang reformasi di Yogyakarta.

Tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah pengantar. Bagian kedua berisi deskripsi tentang Muhammadiyah dan isu yang berkembang dalam organisasi itu sebagai wadah para demonstran. Bagian ketiga adalah para motor aksi protes yaitu Angkatan Muda Muhammadiyah. Bagian keempat yakni kronologi terjadinya aksi 1 Mei 1998 yang dinamakan “Aksi Moral Masyarakat Yogyakarta”, dan ditutup dengan kesimpulan.

Muhammadiyah, Reformasi dan Isu Pemakzulan Soeharto

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan kesehatan. Organisasi ini didirikan Achmad Dahlan pada 1912. Tidak ada yang istimewa jika dikaitkan dengan unsur politik dalam perjalanan sejarah Indonesia, kecuali kedekatan emosional Soekarno dengan organisasi ini, sehingga suatu ketika di tahun 1962 dia berwasiat jika kelak dia meninggal, minta agar peti matinya ditutup dengan bendera Muhammadiyah dan pengakuan Soeharto bahwa dia pernah mengenyam pendidikan dasar di sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta (Drakeley, 2009: 208-221). Alasan itu lumrah adanya, karena memang Muhammadiyah adalah organisasi massa dan bukan partai politik.

Dalam perjalanan historisnya, Muhammadiyah sejak berdiri memang memilih politik kooperatif. Pilihan pragmatis

Muhammadiyah ini karena mendukung cita-cita ‘mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya’. Dibanding harus konfrontatif kepada penguasa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, Soekarno ataupun Soehart (Pasha, 2003: 55-58). Pilihan politik Muhammadiyah ini menjadikannya organisasi paling langgeng di Indonesia, dengan usia lebih dari 100 tahun dalam hitungan kalender masehi dan 103 tahun dalam hitungan kalender hijriyah (Kompas, 23 Nopember 2012). Namun, meskipun begitu, pilihan politik Muhammadiyah mengalami transisi pasca 1990 ketika tampuk kepemimpinan Muhammadiyah berada di tangan akademisi berdarah muda². Mereka lebih responsif terhadap perkembangan Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan orientasi *politik* Muhammadiyah bergeser.

Sebelum 1990, Muhammadiyah dipimpin K.H. A.R. Fachruddin, kiai karismatik yang sebenarnya juga cukup responsif melihat perkembangan kenegaraan, tetapi mempertahankan gaya lama pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang cenderung ‘dekat’ kepada penguasa. A.R. Fachruddin yang menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak 1968 lebih memilih jalan ‘damai’ ketika ingin memberikan masukan kepada Presiden Soeharto. Mengajukan audiensi dan menghadap serta menyampaikan gagasan dengan baik-baik lebih dipilih olehnya dibandingkan pengerahan massa ataupun menyudutkan pemerintah melalui media massa. Suasana pemerintahan yang otoritarian dan serba mengintimidasi pada masa Orde Baru benar-benar mendukung pilihan politik Muhammadiyah itu.

‘Tradisi lama’ komunikasi politik Muhammadiyah dengan pemerintah bergeser sejak pucuk kepemimpinan Muhammadiyah tak

lagi dijabat ‘orang-orang tua’. Muhammadiyah cenderung lebih agresif menyoroti masalah bangsa. Isu pertambangan Busang dan Freeport pada 1996 menjadi awal teriakan Amien Rais, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menjadi representasi Muhammadiyah (Kedaulatan Rakyat, 13 dan 14 Mei 1998). Isu korupsi negara atas pertambangan yang dikelola asing ini terus didengungkan Amien Rais dalam berbagai kesempatan. Media mulai berani mengangkat isu ini sebagai pemberitaan ditengah semakin mudahnya rezim Soeharto mencabut surat izin usaha penerbitan (SIUP).

Gelombang Reformasi 1998 yang memunculkan klimaks turunya orang nomor satu di Indonesia ketika itu tidak bisa dilepaskan dari kiprah pimpinan Muhammadiyah ini. Dia mampu tampil di depan dan menggalang dukungan banyak kalangan seperti budayawan, akademisi dan agamawan serta tentunya mahasiswa dan masyarakat umum (Ricklefs, 2005: 652).

Usul Amien Rais mengenai pembentukan Majelis Amanat Rakyat (MAR) membawa isu pemakzulan Soeharto dan membuat pemerintahan Soeharto meradang. Hal itu semakin menaikkan popularitas Amien Rais. Dia bersama beberapa kalangan mendeklarasikan berdirinya MAR pada 14 Mei 1998. Isu jelang deklarasi tersebut menarik dunia internasional, termasuk Amerika Serikat. Amien Rais pun diundang ke beberapa konferensi internasional yang membahas masa depan Indonesia pasca gulingnya Soeharto, termasuk yang diselenggarakan di negeri Paman Sam itu (Kedaulatan Rakyat, 15 Mei 1998).

Satu statemen menarik yang dilontarkan Amien Rais dan diliput banyak media terkait pemerintahan Soeharto adalah ketika dia ditanya oleh seorang wartawan tentang kesiapannya untuk menjadi lokomotif gerbong reformasi dengan menjadi presiden baru Indonesia. Saat itu Amien Rais menjawab, “Kalau dipercaya rakyat Indonesia, Insya Allah berani!” Kalimat “Insya Allah, Berani!”

2 Muktamar Muhammadiyah 1990 memilih KH. Muhammad Azhar Basyir, M.A. sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun, dikarenakan meninggal, pucuk kepemimpinan Muhammadiyah diserahkan kepada Dr. Amien Rais, M.A.

beserta foto Amien Rais disablon dalam kaos dan dipakai anak-anak muda Muhammadiyah dalam beberapa kali kesempatan unjuk rasa. Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai aliansi mahasiswa Muslim yang terdiri dari HMI, IMM dan berbagi elemen mahasiswa muslim lain yang diinisiasi kelahirannya oleh Amien Rais dalam beberapa kesempatan aksi juga membawa tulisan “*Amien Rais for President*”³.

Geliat Angkatan Muda Muhammadiyah

Muhammadiyah lahir pada tahun 1912 meskipun sebagai konsepsi ideologis, ia dilahirkan beberapa saat sebelumnya. Organisasi ini lahir di tengah kondisi kemerosotan sosial masyarakat akibat kolonialisme. Pendidikan dan kesehatan menjadi sangat mahal diakses untuk orang-orang non-bangsawan. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah mendirikan organisasi sayap wanita bernama Aisyiyah pada 1917. Aisyiyah juga lahir bermula dari pengajian khusus wanita yang bernama *Sopo Tresno* (Darban, 2011: 56).

Seiring munculnya sekolah-sekolah Muhammadiyah, mereka meluaskan jangkauannya; mula-mula kepada para remaja putra dengan mendirikan Kepanduan Hizbul Wathan (HW) pada 1917. Melalui kepanduan ini, para remaja itu diajarkan bagaimana disiplin dengan media latihan baris-berbaris, memukul genderang dan meniup terompet, serta aneka kegiatan lain. HW sukses mengajak banyak remaja putra bergabung (Darban, 2011: 56). Didirikannya HW karena pada suatu hari Achmad Dahlan melihat anak-anak usia remaja sedang berlatih baris-berbaris di depan halaman Puro Mangkunegaran, Surakarta. Hingga akhirnya pada 1932, dibuatlah organisasi formal untuk remaja putra Muhammadiyah dengan nama Pemuda Muhammadiyah (PM) pada 1932 ketika

Muhammadiyah dipimpin oleh KH. Hisyam, 9 tahun setelah meninggalnya Achmad Dahlan.

Setahun sebelum didirikannya PM, organisasi sayap remaja putri Muhammadiyah yang bernama *Nasyiatul Aisyiyah* (disingkat NA, yang berarti tunas muda Aisyiyah) berdiri. Organisasi ini untuk menampung remaja putri untuk dipersiapkan untuk berjuang dalam organisasi Aisyiyah setelah dewasa. Kegiatannya lebih ‘*anak muda*’ dibandingkan Aisyiyah, antara lain ketrampilan menjahit, menari, menyanyi dan tentunya membaca al-Qur’an. Kepanduan NA kemudian menyusul memekarkan diri dari HW pada 1950.

Kuantitas jumlah sekolah milik Muhammadiyah yang terus bertambah bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah yang baru berdiri pada kurun 1960an belum mendorong Muhammadiyah untuk mendirikan sayap organisasi pelajar dan mahasiswa⁴ (Darban, 2011: 58). Padahal jumlah pelajar Muhammadiyah ketika itu sudah sangat banyak, meskipun mahasiswa masih terhitung jari. Baru pada 1961 dan 1964, organisasi sayap yang disebut juga organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah untuk mewadahi pelajar dan mahasiswa yakni Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah lahir. Selanjutnya, dua organisasi kaum intelektual Muhammadiyah inilah yang lebih mendominasi dinamika gerakan kaum muda Muhammadiyah, dibandingkan PM dan NA.

Keempat organisasi kaum muda Muhammadiyah itulah yang kemudian sering disebut sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). Kegiatan IPM lebih masif dan terlihat menonjol dibandingkan sayap muda Muhammadiyah yang lain dikarenakan jumlah sekolah yang dimiliki Muhammadiyah yang terus bertambah berbanding lurus dengan jumlah pelajar. Kuantitas mereka yang banyak dan bahkan ada di setiap kecamatan di mana

3 Wawancara dengan Budi Setiawan, 22 Desember 2012 di Kauman.

4 *Ibid.* Hlm 58.

ada di sana sekolah Muhammadiyah tentu memperluas gerakan IPM.

Berbeda dengan lingkup mahasiswa yang pada 1953 telah diawali dengan munculnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang juga diikuti mahasiswa-mahasiswa yang berafiliasi Muhammadiyah. Kelahiran IMM pun masih dipermasalahkan karena dianggap menyempal dari kesepakatan seluruh elemen muslim bahwa hanya ada satu wadah untuk mahasiswa Islam, yakni HMI. Namun Angkatan Muda Muhammadiyah tetap menjadi wadah komunikasi bagi kaum muda Muhammadiyah yang secara formal terdaftar sebagai anggota-anggota ortom-ortom tersebut. AMM semakin kuat ketika elemen Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) terbentuk yang merupakan elemen PM dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah (TSPM) perkumpulan bela diri Muhammadiyah.

Isu-isu nasional sering kali mendapat respon dari AMM. Ketika Presiden Soeharto pada 1984 mewajibkan satunya organisasi pelajar ke dalam OSIS, AMM merespon keras dan sempat terjadi perpecahan. Begitupula ketika seluruh organisasi masyarakat diwajibkan menggunakan Pancasila sebagai azas tunggal organisasi, perbedaan pendapat sempat menjadi dinamika AMM. Hingga akhirnya ketika krisis Asia 1997 semakin dirasakan pengaruhnya, konflik sosial di berbagai daerah memanas, dan munculnya aksi anti-pemerintah di mana-mana khususnya di kalangan akademisi di kampus, AMM turut merespon isu nasional itu. Tekanan penguasa Orde Baru atas segala tindakan yang melawan rezim mafhum diketahui bersama sangat membahayakan, oleh karena itu, ketidaksepahaman antara satu AMM dengan yang lainnya menjadi maklum adanya.

Halaman Masjid Kauman, 1 Mei 1998

Jelang Mei, Yogyakarta mulai bergejolak. Gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut

turunnya harga, pembersihan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan hingga isu suksesi sudah mulai muncul sejak Maret 1998 di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Tindakan represif ABRI terhadap demonstrasi mahasiswa Universitas Gadjah Mada di sekitaran bunderan UGM pada 2-3 April 1998 semakin mempertegang keadaan. Seakan api yang disiram minyak tanah, gelombang protes anti-pemerintah semakin membara pasca kejadian itu. Demonstrasi susulan di UGM terus berlanjut. Dosen, karyawan dan mahasiswa beberapa kali menggelar mimbar terbuka, salah satunya digelar di Balairung, rektorat UGM, terlebih pasca kejadian di Gejayan 8 Mei 1998 dan di kampus Trisakti empat hari setelahnya (Bernas, 15 Mei 1998).

Kondisi Yogyakarta dan tingkat nasional yang bergejolak itu, mendorong anak-anak muda Muhammadiyah untuk bereaksi. Mereka paham betul bahwa Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta mempunyai basis massa yang kuat. Muhammadiyah identik dengan Yogyakarta, begitu pula sebaliknya, Yogyakarta identik dengan Muhammadiyah. Alasan inilah dipertimbangkan anak-anak muda itu ketika sebuah aksi dilakukan agar mudah di-*blow-up* di media. Untuk mencari dukungan dari warga Muhammadiyah di Yogyakarta pun menurut mereka tidak sulit, meskipun sebenarnya anggota Muhammadiyah sering kali kurang bisa tegas perihal langkah politik.

Diawali dengan kedatangan Argo Widodo dan Fani Satria, aktivis Pemuda Muhammadiyah ke Busyro Muqoddas, seorang pengurus Muhammadiyah, untuk meminta pendapat terkait rencana mereka mengajak masyarakat dan simpatisan Muhammadiyah berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut perbaikan keadaan mengingat krisis semakin menjadi, disepakatilah pelaksanaan sebuah aksi demonstrasi. Ketika itu, Busyro menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan aktivis Pusat HAM UII.

Busyro sebelumnya pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1980-1983, menggantikan Asnawi⁵.

Usai bertemu dengan Busyro, Argo dan Fani mendatangi Budi Setiawan yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Badan Pendidikan Kader (BPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Mereka berdiskusi terkait aksi yang juga disepakati oleh Budi. Namun, yang menjadi pertimbangan adalah ketakutan akan tindakan represif aparat yang semakin menjadi, seperti yang terjadi di UGM, 2-3 April sebelumnya (Kedaulatan Rakyat, 3-4 April 1998). Dengan segala pertimbangan, mereka bersepakat untuk melaksanakan aksi demonstrasi pada 1 Mei 1998. Aksi itu dilaksanakan di halaman Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, setelah shalat Jumat. Dengan target peserta 1000 orang. Selebaran dibuat dan disebar ke beberapa titik basis Muhammadiyah melalui masjid dan mushalla.

Selain Argo dan Fani, Paryanto Rahma dan Sa'ud Elujad dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga menjadi motor aksi itu. Merespon ajakan anak-anak muda Muhammadiyah itu, Budi Setiawan, ketua BPK PWM DIY, yang bertanggung jawab atas perkaderan dan semua hal yang terkait dengan ortom Muhammadiyah memberanikan diri untuk mengusulkan ke pengurus PWM yang lain. Usulan ini direspon baik dan Budi ditunjuk sebagai penanggung jawab aksi sekaligus dibekali dana bantuan pelaksanaan aksi sebesar 600 ribu rupiah. Uang itu digunakan Budi untuk membeli peralatan aksi berupa kertas karton dan cat. Dikarenakan aksi dilaksanakan di halaman masjid Kauman dan Budi merupakan putra dari Imam Masjid Gedhe Kauman, masyarakat Kauman sangat bersemangat ikut mendukung dan berkontribusi menggaungkan tuntutan reformasi ekonomi-politik bangsa⁶. Dengan proses lobi yang singkat dan cepat, masyarakat Kauman bersedia menanggung

seluruh konsumsi berupa nasi bungkus dan minuman (air putih dan sirup) untuk para peserta aksi (Bernas, 2 Mei 1998).

Dalam mempersiapkan aksi itu, koordinator aksi saling berbagi tugas. Paryanto dan Sa'ud Elujad mendapatkan tugas sebagai koordinator lapangan. Sisanya, selain bertugas memastikan konsumsi, menyiapkan peralatan aksi seperti jenset, pengeras suara, juga ada yang mencari jaminan keamanan kegiatan. Dikarenakan para motor itu kurang bisa menjadi seorang orator, mereka berpikir perlu mengundang beberapa orang yang bisa dipasang menjadi orator. Selain Busyro Muqoddas, perwakilan dari ortom tingkat DIY juga bersedia memberikan orasi. Nama kelompok aksi pun telah disepakati 'Komite Nasional Angkatan Muda Muhammadiyah' (Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 1998).

Aksi yang dinamakan 'Aksi Moral Masyarakat Yogya' itu dimulai setelah shalat Jumat sekitar pukul 1 siang. Media lokal menulis, peserta aksi mencapai tidak kurang dari 1000 orang yang terdiri dari massa AMM dari IMM, IPM, NA, Aisyiyah juga cendekiawan, akademisi, mahasiswa, pelajar, masyarakat umum (Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 1998 & Bernas, 2 Mei 1998). Berbagai spanduk berbunyi "Turunkan Harga" dan "Biar Bumi Bergoyang, Reformasi Tetap Jalan" dan juga "Gelar Mahkamah" dibawa oleh para peserta aksi. Halaman Masjid Kauman benar-benar dipenuhi oleh peserta aksi meskipun hujan turun (Bernas, 2 Mei 1998).

Imam Masjid Kauman, KH. Haiban Hadjid, mengawali rangkaian orasi. Sebelumnya, Haiban yang juga Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) DIY dan pengurus Muhammadiyah ini memimpin doa agar aksi yang dilaksanakan pada siang hari ini diridhoi Allah dan mendapatkan kemanfaatan yang besar. Setelah dibuka, massa terus meneriakkan pekik *Allahu Akbar*. Haiban mengingatkan dan memberikan semangat bahwa penyerbuan Jepang di Kotabaru

5 Wawancara Budi Setiawan, 22 Desember 2012 di Kauman.

6 Wawancara Budi Setiawan, 22 Desember 2012 di Kauman.

7 Oktober 1945 silam juga bermula dari halaman masjid ini. Setiap aksi menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran yang dimulai dari halaman masjid ini akan berhasil. Tentunya dilandasi keikhlasan, begitu yang disampaikan ayah Budi Setiawan ini (Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 1998 & Bernas, 2 Mei 1998).

Berturut-turut menyampaikan orasi setelah Haiban tampil adalah Fauzi AR (putera KH AR Fachruddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1968-1990), Busyro Muqoddas (Dekan FH UII), Uswatun Ghozali (anggota Pimpinan Wilayah Aisyiyah) dan juga dua mantan korban *Jugun Ianfu*, Mardiyem dan Musrifah. Aktivis mahasiswa juga turut diundang menyampaikan orasi. Mereka yang lebih mengetahui isu terkini nasional sehingga perlu dihadirkan untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan aktivis mahasiswa hingga saat ini. Ridaya La Ode Ngkowe (Senat Mahasiswa UGM) dan Ridwan R. Baswedan (Dewan Perwakilan Mahasiswa UII). Hendro Pleret dari ISI, Ketua DPP IMM Fakih dan sejumlah aktivis lainnya turut menyampaikan orasi. Mimbar bebas bertajuk 'Aksi Moral Masyarakat Yogya' itu berlangsung kurang dari dua jam dan ditutup dengan doa oleh Adaby Darban, pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UGM dan juga warga Kauman (Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 1998 & Bernas, 2 Mei 1998).

Terkait dengan keamanan, atas bantuan Syukri Fadholi, mantan aktivis Muhammadiyah yang ketika itu menjadi Ketua DPC Kota Yogyakarta, tentara berhasil diyakinkan bahwa aksi hanya berlangsung di halaman masjid dan tidak menjalar ke luar. Said Tuhuleley, pengurus Keluarga Alumni HMI (KAHMI) dan pengurus Muhammadiyah, juga mencoba melakukan pendekatan ke tentara. Alhasil, sepanjang pelaksanaan unjuk rasa, aparat tidak ada yang mendekat. Mereka hanya berjaga-jaga di bagian timur Alun-alun Utara Yogyakarta, sekitar 250 meter dari halaman Masjid Kauman. Harto, salah satu

pendekar Tapak Suci dari Kauman, beserta anggota Tapak Suci dan KOKAM selama acara juga menjaga keamanan di lokasi acara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Aksi ini memang hanya berlangsung kurang dari dua jam tetapi dampaknya cukup besar kepada masyarakat yang luas. Mahasiswa semakin percaya diri ketika masyarakat umum juga mulai menggelorakan semangat yang sama, yakni menuntut reformasi. Masyarakatpun terinspirasi untuk mengikuti aksi demonstrasi seperti yang dilakukan masyarakat Kauman dan sekitarnya di depan masjid Kauman. Aksi yang disebut sebagai aksi luar kampus pertama dalam proses tuntutan reformasi ini membuka tembok aspirasi rakyat. Pasca kejadian itu, seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di Yogyakarta semakin percaya diri. Menanggapi aksi ini, internal AMM terpecah. Ketakutan akan tekanan rezim menjadi pertimbangan utama.

Paryanto yang menjadi koordinator lapangan mendapat teguran keras dari Ketua IPM, Izzul Muslimin.⁷ Aksi nekatnya bersama teman-teman AMM yang lain dengan menggerakkan masyarakat untuk berunjuk rasa dianggap akan merugikan organisasi. Terlebih malam harinya, Wiranto, selaku Menteri Kepolisian, Hukum dan Keamanan (POLHUKAM) dan Panglima ABRI melalui media elektronik menyampaikan, siapapun yang berani melakukan aksi di luar kampus akan ditindak. Statemen Wiranto ini diulangi dalam beberapa kesempatan dan diliput di media cetak dan elektronik nasional (Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 1998).

Kesimpulan

Gelombang menuntut reformasi sosial-ekonomi memang bermula dari kampus. Berbagai aksi unjuk rasa hadir di sana. Demonstrasi itu sesekali diikuti bentrok dengan aparat keamanan. Gelombang tersebut

7 Wawancara Budi Setiawan, 22 Desember 2012 di Kauman.

beresonansi ke luar kampus. Masyarakat turut merespon dengan melaksanakan aksi serupa di luar kampus. Apa yang dilakukan Komite Nasional Angkatan Muda Muhammadiyah dengan menggerakkan simpatisan Muhammadiyah di Yogyakarta hadir dalam aksi 1 Mei 1998 merupakan respon dari gelombang tuntutan reformasi yang terus didengungkan berbagai elemen masyarakat. Aksi 1 Mei 1998 menjadi bukti bahwa perbaikan kondisi sosial-ekonomi dengan reformasi menjadi cita-cita kolektif masyarakat.

Aksi 1 Mei 1998 ini menjadi istimewa dan penting karena inilah aksi pertama yang diselenggarakan luar kampus yang diikuti oleh masyarakat umum meskipun elemen mahasiswa juga terlibat di dalamnya. Aksi ini semakin menguatkan tekad mahasiswa dan masyarakat umum di Yogyakarta pada khususnya bahwa perubahan dengan reformasi itu pasti akan terwujud. Pendekatan psikoanalisis yang dipakai untuk menganalisa aksi ini semakin memperjelas bagaimana transfer kekecewaan bersama itu bisa membangkitkan sebuah aksi kolektif ketika bisa diagensikan dengan tepat. Aksi 1 Mei 1998 yang menggelorakan reformasi dari Masjid Gedhe Kauman menjadi salah satu contohnya.

Bibliografi

Darban, A. Adaby. 2011. *Sejarah Kauman Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Drakeley, S. 2009. "Bung Karno And The Bintang Muhammadiyah: A Political Affair". *New Zealand Journal of Asian Studies*. 11 (1): 208-221.

Pasya, Musthafa Kemal et al. 2003. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Ricklefs, MC. 2004. *Sejarah Modern Indonesia 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

Surat Kabar

Kedaulatan Rakyat, 3 April 1998

Kedaulatan Rakyat, 4 April 1998

Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 1998

Kedaulatan Rakyat, 8 Mei 1998

Kedaulatan Rakyat, 13 Mei 1998

Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 1998

Kedaulatan Rakyat, 15 Mei 1998

Kedaulatan Rakyat, 16 Mei 1998

Bernas, 2 Mei 1998

Bernas, 15 Mei 1998

Kompas, 23 November 2012

Kompas, 21 November 2012

Sumber Lisan

Budi Setiawan (59) di Kauman, 21 Desember 2012

Lampiran



Gambar 1. Suasana Aksi 1 Mei 1998 (Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 1998)



Gambar 2. Suasana Aksi 1 Mei 1998 (Bernas, 2 Mei 1998)



Gambar 3. Berita tentang Aksi 1 Mei 1998 (Kedaulatan Rakyat, 2 Mei 1998)



Gambar 4. Berita tentang Aksi 1 Mei 1998 (Bernas, 2 Mei 1998)